



LAPORAN DELEGASI DPR RI "11th MIKTA Speakers' Consultation 2025"

Seoul, Republik Korea - 12 November 2025



**THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025**



**LAPORAN
DELEGASI DPR RI**

**"11TH
MIKTA SPEAKERS'
CONSULTATION
2025"**

Seoul, Republik Korea
12 November 2025



LAPORAN DELEGASI DPR RI MENGHADIRI
THE 11th MIKTA SPEAKERS' CONSULTATION FORUM 2025
"INCLUSIVE PARLIAMENTARY LEADERSHIP FOR A UNIFIED AND SHARED FUTURE"

12 November 2025 | Seoul, Korea Selatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas internasional saat ini menghadapi lanskap global yang ditandai oleh krisis multidimensi. Konflik geopolitik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, termasuk Ukraina, Timur Tengah, Sudan, serta wilayah-wilayah lain, menimbulkan instabilitas yang berlapis, mulai dari krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga tekanan ekonomi jangka panjang. Pada saat yang sama, percepatan perubahan iklim dan bencana alam yang meningkat menguji ketahanan negara. Di sisi lain, kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar akibat perkembangan teknologi yang tidak merata, termasuk lonjakan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dan kebutuhan energi yang menyertainya juga terus meningkat. Di tengah tantangan global yang menguat ini, kapasitas kerja sama multilateralisme justru menunjukkan tanda-tanda melemah yang disertai dengan menguatnya nasionalisme, proteksionisme, dan fragmentasi geopolitik yang menghambat respons kolektif.

Dalam situasi seperti ini, kolaborasi antar-parlemen menjadi semakin penting untuk mempertahankan nilai-nilai dialog, kemitraan, dan solusi bersama. Negara-negara *middle power* berada pada posisi strategis untuk memainkan peran penyeimbang dan jembatan, khususnya ketika kepemimpinan global dari aktor-aktor tradisional tidak lagi sekuat sebelumnya. Berdasarkan kesadaran akan urgensi inilah, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia membentuk MIKTA yang memanfaatkan keunikan posisi *middle powers* sebagai katalisator revitalisasi tatanan internasional. Melalui MIKTA Speakers'

Forum, parlemen kelima negara ini berupaya memperkuat kontribusi kolektif dalam membangun kembali kepercayaan global serta meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi krisis kemanusiaan, perubahan iklim, dan polarisasi sosial yang semakin tajam.

Sejak pembentukannya pada tahun 2013, MIKTA berkembang sebagai *platform* fleksibel yang mendorong dialog, solidaritas, dan kerja sama praktis antar *middle powers*. Dalam konteks lemahnya arsitektur multilateral global, peran parlemen MIKTA menjadi semakin signifikan sebagai aktor yang mampu menjembatani kepentingan nasional, kebutuhan masyarakat, serta dinamika internasional. Forum ini memungkinkan pertukaran pengalaman, penyusunan inisiatif bersama, dan konsolidasi suara kolektif terkait isu-isu global seperti perdamaian dan bantuan kemanusiaan, transisi energi berkeadilan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan integrasi sosial di tengah polarisasi politik. Dengan demikian, MIKTA tidak hanya menjadi kanal diplomasi parlemen, tetapi juga ruang strategis untuk mengartikulasikan visi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Suasana Sidang 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum 2025. Dok: DPR RI

Penyelenggaraan 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum pada 12 November 2025 di Seoul mengusung tema besar *Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future*, yang menegaskan peran sentral parlemen dalam memimpin upaya kolektif menghadapi tantangan global. Forum ini mendiskusikan berbagai tema dan agenda pembahasan di antaranya kerja sama perdamaian dan bantuan kemanusiaan, transisi energi berkeadilan di era AI, penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, hingga upaya

pemulihan integrasi sosial akibat polarisasi politik. Sebagai negara demokrasi besar dan *middle power* yang aktif di tataran regional maupun global, partisipasi DPR RI menjadi momentum untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai penggerak multilateralisme, promotor dialog inklusif, dan mitra strategis dalam membangun masa depan global yang lebih bersatu, adil, dan tangguh.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi DPR RI dalam rangka penyelenggaraan sidang The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum pada 12 November 2025 di Seoul, Korea Selatan didasarkan pada:

1. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Surat Disposisi Pimpinan DPR RI tanggal 14 Oktober 2025 dengan Nomor Agenda 424/INTERNAL/KORPOLKAM/DPR RI/X/2025 tentang Permintaan Izin dan Dukungan Anggaran
3. Surat Tugas Nomor 28/KU.05.01/ST/KSOI/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Perjalanan Dinas ke Seoul (Korea Selatan) dalam rangka Menghadiri Sidang MIKTA Speakers Consultation ke 11 selama 7 hari terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 14 November 2025.

C. Susunan Delegasi

Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum pada 12 November 2025 di Seoul, Korea Selatan, terdiri dari:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. (H.C) Puan Maharani	F. PDIP / A-199	Ketua DPR RI / Anggota Komisi I BKSAP
2.	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, M.Comn&MediaSt.	F.PDIP / A-258	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Komisi V
3.	Charles Honoris	F. PDIP / A-176	Anggota BKSAP / Wakil Ketua Komisi IX
4.	Dede Indra Permana Soediro, S.H.	F. PDIP / A-210	Anggota BKSAP / Wakil Ketua Komisi III

5.	Diah Pikatan O. Putri Haprani	F. PDIP / A-198	Anggota BKSAP / Anggota Komisi XI
6.	Shanty Alda Nathalia, S.H.	F. PDIP / A-207	Anggota Komisi XII

Selama menghadiri persidangan MIKTA, Delegasi didampingi oleh pejabat dari Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Setjen DPR RI dan Tenaga Ahli BKSAP.

D. Visi dan Misi Delegasi

1. Visi Delegasi

Visi Delegasi DPR RI dalam keikutsertaannya pada Sidang The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan adalah:

- Mempertegas peran DPR RI sebagai parlemen *middle-power* yang aktif dalam mendorong revitalisasi multilateralisme, khususnya melalui kerja sama MIKTA dalam menghadapi krisis global.
- Mengusung kepemimpinan parlemen yang inklusif untuk memastikan respons global yang lebih adil dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, dialog, dan penyelesaian sengketa secara diplomatis.
- Menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dalam isu-isu prioritas MIKTA, termasuk transisi energi yang berkeadilan, perlindungan kelompok rentan, penguatan jaring pengaman sosial, serta tata kelola teknologi dan AI yang aman, etis, dan berpihak pada pembangunan.
- Memperkuat jejaring kerja sama antar-parlemen MIKTA untuk meningkatkan pertukaran praktik terbaik, memperluas diplomasi parlemen, dan membangun posisi kolektif yang konstruktif dalam agenda-agenda global.
- Mendorong konsolidasi MIKTA sebagai platform strategis *middle powers*, termasuk penguatan mekanisme konsultasi, sinkronisasi isu prioritas, serta kontribusi nyata dalam penyusunan Joint Statement MIKTA yang lebih responsif terhadap tantangan global yang berkembang.

2. Misi Delegasi

Misi Delegasi DPR RI pada Sidang The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan antara lain:

- Berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian sidang, termasuk menyampaikan intervensi substantif pada setiap sesi tematik serta

mengajukan rekomendasi penguatan isi Joint Statement agar selaras dengan kebijakan nasional Indonesia dan kontribusi *middle-power* terhadap tatanan global yang inklusif.

- b. Menyampaikan perkembangan kebijakan Indonesia dalam isu-isu prioritas MIKTA serta berbagi praktik baik Indonesia dalam isu perdamaian, pembangunan inklusif, pengurangan kesenjangan, dan polarisasi politik.
- c. Memberikan dukungan terhadap pembahasan dan finalisasi Joint Statement MIKTA 2025, khususnya penguatan peran parlemen dalam *peacebuilding*, bantuan kemanusiaan, pengawasan kebijakan iklim dan energi, serta respons terhadap polarisasi politik di berbagai negara.
- d. Mendorong peningkatan efektivitas mekanisme MIKTA sebagai platform kerja sama *middle powers*, termasuk penguatan dialog antar-parlemen serta prioritas isu-isu lintas kawasan yang memerlukan respons kolektif dan berbasis bukti.
- e. Memperkuat sinergi antara parlemen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya agar kontribusi Indonesia dalam forum ini lebih terkoordinasi, inklusif, dan mendukung pencapaian visi *Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future*.

E. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan dan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan, baik dari segi teknis maupun dari sisi substansi. Untuk persiapan substansi Delegasi, Sekretariat dan Tenaga Ahli BKSAP menyiapkan materi berupa kerangka acuan kegiatan, pidato, saran butir wicara, serta usulan sambutan sesuai dengan isu yang dibahas dalam forum. Penyusunan materi dilaksanakan melalui berbagai rapat dan diskusi serta permintaan bahan dan masukan dari Kementerian Luar Negeri.



II. ISI LAPORAN

A. Agenda Sidang

Selasa, 12 November 2025	
08.30 – 12.00	JOINT STATEMENT DRAFTING COMMITTEE
10.10 – 10.20	SESI PEMBUKAAN
10.20 – 11.10	SESI PERTAMA: <i>Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance</i>
11.20 – 12.10	SESI KEDUA: <i>The Role of Parliament in Ensuring the Just Energy Transition in the Era of AI and the Climate Crisis</i>
14.00 – 14.50	SESI KETIGA: <i>The Role of Parliament in Including the Vulnerable and Reducing Inequalities</i>
14.00 – 14.50	PERTEMUAN BILATERAL KETUA DPR RI DENGAN KETUA NATIONAL ASSEMBLY KOREA SELATAN
15.00 – 15.50	SESI KEEMPAT: <i>The Role of Parliament in Promoting Social Integration to Address Polarization</i>
15.50 – 16.00	UPACARA PENUTUPAN
	- Pembacaan dan Adopsi Joint Statement - Sambutan dari Ketua selanjutnya (Australia)

B. Joint Statement Drafting Committee

Sejak Bulan September 2025, tuan rumah National Assembly Korea Selatan telah melakukan rancangan awal pernyataan bersama untuk dapat disepakati dan ditandatangani pada pelaksanaan MIKTA Speakers' Consultation Forum. Indonesia telah memberikan masukan tertulis mengenai antara lain: (1) pentingnya peran multilateralisme dalam berbagai penyelesaian masalah global; (2) menyambut baik dan mendorong terus upaya *peacebuilding* dan rekonstruksi di Jalur Gaza, termasuk akses kemanusiaan yang tidak boleh terganggu; (3) menekankan pentingnya dialog, penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, dan proses politik yang inklusif untuk resolusi yang adil

dan berkelanjutan; (4) menekankan peran diplomasi parlemen dalam *peacebuilding* di berbagai kawasan; serta (5) menggarisbawahi jendela demografi sebagai salah satu kesempatan sekaligus bisa menjadi ancaman tatanan masyarakat.

Paralel dengan pertemuan utama, diskusi untuk menyepakati draft akhir dilakukan pada 12 November 2025 Pukul 08.30-12.00. Perdebatan yang muncul pada saat pertemuan drafting committee adalah mengenai detail penjabaran pernyataan mengenai Palestina dan Syria. Setelah menampung dan menyepakati beberapa masukan dan perbedaan pendapat dari parlemen negara-negara, draft Joint Statement disepakati dan ditandatangani oleh seluruh delegasi pada sesi penutupan.

C. Sesi Pembukaan

Sesi Pembukaan The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan pada 12 November 2025 dimulai pada pukul 10.10. Sesi ini diawali dengan sambutan Sekretaris Jenderal National Assembly Korea Selatan diikuti oleh pidato pembukaan oleh Ketua National Assembly Korea Selatan, kemudian diakhiri dengan sesi perkenalan dari setiap delegasi.



Sekretaris Jenderal National Assembly Korea Selatan, Hon. Kim Minki menyampaikan sambutan pada sesi pembukaan sidang 11th MIKTA Speakers' Consultations Forum 2025. Dok: DPR RI

1. Sambutan Sekretaris Jenderal National Assembly Korea Selatan, Hon. Kim Minki

Sekretaris Jenderal National Assembly Republik Korea membuka Sidang 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi yang hadir di Seoul. Beliau berharap agar seluruh

sesi diskusi dapat berlangsung produktif, berorientasi solusi, dan menghasilkan keluaran yang dapat memperkuat peran parlemen dalam menghadapi krisis global yang terus berkembang. Sekretaris Jenderal menegaskan kembali komitmen National Assembly Korea Selatan sebagai tuan rumah untuk mendukung kelancaran seluruh proses persidangan.

2. Pembukaan oleh Ketua National Assembly Korea Selatan H.E. Woo Won-shik

Ketua National Assembly Korea Selatan selaku tuan rumah dalam sambutannya menegaskan karakter unik MIKTA sebagai platform lima negara dari kawasan, budaya, dan sistem politik yang berbeda namun menyatu dalam identitas *responsible middle powers*. Keragaman tersebut justru menjadi kekuatan utama MIKTA, yang memungkinkan forum ini menjadi jangkar inklusivitas, kolaborasi, dan moderasi di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar di panggung global.

Dalam sambutannya, Ketua National Assembly Korea Selatan juga menekankan urgensi penguatan multilateralisme. Woo Won-shik menggarisbawahi bahwa tatanan internasional saat ini membutuhkan reimajinasi peran negara-negara *middle power*, yang mampu menghadirkan pendekatan dialogis, berbasis konsensus, dan berorientasi pada kemanusiaan. Parlemen, sebagai institusi demokratis yang menghimpun aspirasi publik, dipandang memiliki peran strategis dalam revitalisasi multilateralisme, baik melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun diplomasi parlemen.



Ketua National Assembly Korea Selatan H.E. Woo Won-shik menyampaikan sambutan pada sesi pembukaan sidang 11th MIKTA Speakers' Consultations Forum 2025. Dok: DPR RI

Ketua National Assembly Korea Selatan juga menyampaikan bahwa komitmen politik dalam forum seperti MIKTA harus diikuti dengan implementasi nyata. Woo Won-shik menyerukan agar para pimpinan parlemen tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi juga memastikan bahwa rekomendasi dan Joint Statement benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional dan kolaborasi lintas negara. Seruan ini dengan tegas menempatkan MIKTA bukan sekadar wadah dialog, tetapi forum aksi yang mampu menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat global.

Sebagai penutup, Woo Won-shik mengucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi atas komitmen mereka dalam memperkuat kemitraan MIKTA. Ia menegaskan bahwa National Assembly Republik Korea akan terus mendukung kerja kolektif MIKTA dalam membangun masa depan global yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Sesi Pertama - *Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance*

Sesi Pertama The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan pada 12 November 2025 dimulai pada pukul 10.20 dengan topik *Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance*. Pada sesi ini, masing-masing delegasi akan menyampaikan pidato mengenai pandangan, tantangan, dan praktek baik di negara dan parlemen masing-masing terkait isu *peacebuilding* dan bantuan kemanusiaan.



Ketua National Assembly Korea Selatan H.E. Woo Won-Shik memimpin langsung delegasi Parlemen Korea di sesi I sidang 11th MIKTA Speakers' Consultations Forum 2025. Dok: DPR RI

Delegasi Korea menyampaikan pandangan mengenai eskalasi konflik sejak awal abad ke-21 dan kaitannya dengan pengungsian serta perubahan iklim, termasuk dampak perang di Ukraina dan Gaza. Mengusung pendekatan Humanitarian-Development-Peace (HDP) nexus pasca World Humanitarian Summit 2016, Korea menekankan peran parlemen melalui anggaran, pengawasan, dan legislasi bantuan darurat luar negeri yang lebih komprehensif. Korea juga mendorong transparansi ODA, pembentukan platform parlemen untuk aktor kemanusiaan, dan kolaborasi dengan dunia usaha serta LSM agar bantuan berdampak nyata.

Membuka pidatonya, Delegasi Australia menyampaikan belasungkawa atas insiden di Turki dan Korea. Delegasi juga menekankan *best practices* pembangunan perdamaian yang jujur (*truth-telling*) dan peka terhadap gender. Australia memandang *peacebuilding* sebagai proses panjang yang memerlukan komitmen lintas aktor dan kesinambungan kebijakan.

Delegasi Meksiko menyampaikan pernyataannya yang menilai dunia bergerak menuju paradigma baru di tengah ketimpangan dan kekurangan pendanaan kemanusiaan. Delegasi menekankan tuntutan tiga langkah yang dapat dilakukan parlemen negara MIKTA, di antaranya (1) menyelaraskan UU domestik dengan hukum humaniter internasional, (2) mendorong pembentukan protokol dan hukum internasional yang relevan, dan (3) mengadvokasi peningkatan anggaran spesifik untuk bantuan kemanusiaan. Meksiko juga turut mendorong peran aktif MIKTA di PBB untuk mendorong *peacebuilding* dan bantuan kemanusiaan.

Delegasi Turki melanjutkan dengan menyoroti krisis global yang semakin meningkat dan menurunnya kepercayaan pada multilateralisme. Delegasi menekankan bahwa MIKTA memiliki hal-hal yang dibutuhkan oleh tatanan internasional, yaitu moderasi, keterwakilan lintas kawasan, dan kapasitas. Delegasi Turki juga menyampaikan bahwa *peacebuilding* harus bersifat inklusif. Bicara mengenai kondisi di Gaza, Delegasi juga menyampaikan bahwa pasca gencatan senjata di Gaza, bantuan kemanusiaan perlu ditingkatkan, dan parlemen MIKTA harus berperan untuk mencegah konflik sebelum membesar.

Ketua Delegasi Indonesia, Puan Maharani menyampaikan pernyataan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Delegasi Indonesia menegaskan komitmen pada penyelesaian damai berbagai konflik global dengan berpegang pada hukum internasional dan Piagam PBB. Dengan persaingan geopolitik yang semakin intensif, terjadi peningkatan anggaran militer dan normalisasi penggunaan kekuatan yang menguji kerja sama kolektif negara-negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan hukum internasional, melindungi warga sipil, dan membangun perdamaian.
- Delegasi DPR RI juga menyatakan keprihatinan pada situasi di Palestina

dan Ukraina, serta berbagai konflik lainnya, termasuk di Semenanjung Korea, Sudan, Yaman, Lebanon, Myanmar, dan lain-lain. Indonesia menekankan proses *peacebuilding* dengan seruan gencatan senjata melalui negosiasi dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.

- Untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan, Delegasi DPR RI menggarisbawahi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam konflik, rancangan perdamaian yang peka dengan konteks, dan kemitraan antara pemerintah–masyarakat. Untuk mencegah konflik yang berulang, Indonesia menekankan penguatan kapasitas nasional melalui manajemen konflik, keadilan transisional, keamanan, pemulihan ekonomi, dan layanan publik.
- Delegasi DPR RI juga menekankan signifikansi instrumen multilateral perangkat PBB untuk memperkuat lembaga nasional dan daerah. Prinsip kemanusiaan, netralitas, imparialitas juga harus ditegakkan dan bantuan tidak boleh dipolitisasi.



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memimpin langsung delegasi Parlemen Indonesia di sesi I sidang 11th MIKTA Speakers' Consultations Forum 2025. Dok: DPR RI

- Delegasi menyampaikan tiga langkah konkret yang dapat dilakukan parlemen negara MIKTA, yaitu: (1) koordinasi lintas-parlemen yang lebih cepat untuk memastikan akses kemanusiaan dan memperkuat kepemilikan nasional, (2) adopsi dan implementasi standar internasional ke regulasi domestik, dan (3) pendanaan perdamaian yang dapat diprediksi melalui proses anggaran nasional dan kontribusi ke mekanisme multilateral.

E. Sesi Kedua - *The Role of Parliament in Ensuring the Just Energy Transition in the Era of AI and the Climate Crisis*

Sesi kedua The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan pada 12 November 2025 dimulai pada pukul 11.20 dengan topik *The Role of Parliament in Ensuring the Just Energy Transition in the Era of AI and the Climate Crisis*.

Pada sesi ini, masing-masing delegasi akan berbagi pandangan, tantangan, dan praktek baik di negara dan parlemen masing-masing mengenai isu transisi energi berkeadilan di era kecerdasan buatan dan krisis iklim.

Pada sesi ini Delegasi Meksiko menyoroti kekacauan yang timbul akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terkendali dan dampak nyata perubahan iklim. Delegasi menyatakan bahwa fokus kebijakan harus mengarah pada dekarbonisasi, komitmen terhadap penggunaan energi alternatif, dan kerja sama konkret lintas negara untuk mengurangi emisi.

Delegasi Parleme Turki menyambung dengan mendukung percepatan transisi energi yang sensitif pada kebutuhan sosial dan mempertimbangkan keadilan. Delegasi menekankan pentingnya kerangka hukum yang memayungi investasi bersih. Selain itu, penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Dalam persepektif yang sejalan, Delegasi Australia menegaskan bahwa transformasi energi dan AI sedang membentuk ulang dunia dan menuntut respons segera. Parlemen harus memastikan transisi berjalan adil melalui kerangka AI yang bertanggungjawab, dengan pengawasan, standar keamanan, dan melibatkan komunitas lokal. Delegasi Australia juga menyatakan MIKTA adalah koalisi yang berbasis prinsip dan bersifat praktis.

Sebagai latar belakang dalam pidatonya, Delegasi Parlemen Korea Selatan memulai pidatonya dengan proyeksi kenaikan suhu ekstrem tiga sampai lima tahun ke depan dan lonjakan konsumsi listrik pusat data global. Korea menargetkan netral karbon dengan cara mengeluarkan undang-undang dan melakukan reformasi kelembagaan untuk mengurangi emisi. Untuk menjamin transisi yang adil, Korea menyiapkan kompensasi, *re-skilling*, perlindungan kesejahteraan energi, dan mediasi konflik-kesenjangan melalui instrumen anggaran dan legislasi.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pernyataan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Dengan menekankan urgensi perubahan iklim dan tuntutan transisi energi bersih, Delegasi Indonesia menekankan dan mengkritik ketimpangan global antara belanja militer serta pendanaan iklim dan SDGs. Indonesia juga melihat transisi energi sebagai isu sosial-politik, sehingga tidak boleh mengorbankan kelompok rentan atau memperdalam ketimpangan.

- Delegasi Parlemen Indonesia menggarisbawahi bahwa konsep transisi energi yang adil harus menjadi kerangka utama. Untuk itu, keterlibatan pekerja, komunitas, dan pemerintah daerah dalam pembentukan kerangka tersebut menjadi keharusan. Sebagai syarat legitimasi transisi energi, negara harus membangun perlindungan dan peningkatan keterampilan pekerja, dukungan pendapatan saat diperlukan, penataan ulang ekonomi lokal, serta akses energi yang andal dan terjangkau.
- AI adalah teknologi strategis yang dapat mempercepat pencapaian SDGs, namun demikian harus ditopang dengan fondasi tata kelola energi dan iklim yang kuat. Indonesia dalam hal ini mendorong tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi *Global-South* agar kesenjangan teknologi tidak melebar.



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan statemen pada sesi II Sidang MIKTA dengan tema *The role of parliament in ensuring the just energy transition in the era of AI and the climate crisis.*

Dok: DPR RI

- Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin delegasi Parlemen Indonesia menutup dengan menekankan mandat kunci parlemen dalam memastikan transisi energi yang adil, antara lain: (1) menetapkan arah regulasi jangka panjang dan kepastian hukum investasi, (2) menyerap aspirasi pihak terdampak melalui konsultasi luas, (3) memastikan penganggaran dan pengawasan yang efektif agar dana sampai ke pekerja dan warga, serta (4) menjamin akuntabilitas penggunaan AI.

F. Sesi Ketiga - *The Role of Parliament in Including the Vulnerable and Reducing Inequalities*

Sesi ke-tiga The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan pada 12 November 2025 dimulai pada pukul 14.00 dengan topik *The Role of Parliament in Including the Vulnerable and Reducing Inequalities*. Pada sesi ini, delegasi dari kelima negara MIKTA akan menyampaikan pandangan dan berbagi praktek baik mengenai isu inklusivitas untuk mengurangi ketidaksetaraan.



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Presiden Senat Australia, H.E. Mrs. Sue Lines. Dok: DPR RI

Delegasi Australia memulai dengan menekankan sistem representasi yang harus mencerminkan rakyat, termasuk kelompok minoritas dan *first nations* (suku asli Benua Australia).

Kebijakan diarahkan pada penutupan kesenjangan gaji antar gender (*gender pay gap*), reformasi pembayaran gaji yang lebih adil, dukungan partisipasi kerja perempuan (termasuk dengan memberikan keringanan pajak dan dukungan perawatan anak), serta penguatan rasa kepedulian di dalam masyarakat (*care in community*).

Delegasi Meksiko kemudian mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat kerangka hukum untuk memerangi ketidaksetaraan gender. Delegasi Meksiko juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Meksiko mencontohkan komposisi jender di parlemennya yang setara (250 perempuan dari 500 orang total anggota) sebagai capaian representasi.



Delegasi Parlemen Turkiye Mevlut Cavusoglu bersama Ketua National Assembly Korea Selatan H.E. Woo Won-shik. Dok: Mevlut Cavusoglu/X

Delegasi Parlemen Turkiye yang dipimpin oleh Mevlut Cavusoglu membuka pernyataannya dengan menunjukkan pentingnya memastikan partisipasi kelompok rentan secara bermakna. Hasil dari inklusivitas ini juga harus ditunjukkan dengan hasil yang terukur, dengan ukuran keberhasilan yang bukan hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, tetapi juga hasil yang menunjukkan martabat warga. Turki mengatakan bahwa jaminan sosial dan standar pemerintahan yang bertanggung jawab harus menjadi landasan dan negara-negara MIKTA diminta untuk menunjukkan praktek-praktek terbaik agar menjadi rujukan bagi berbagai negara lainnya.

Delegasi Korea kemudian menyatakan bahwa negara tersebut belajar dari krisis 1998 untuk memperkuat jaminan dan jaring pengaman sosial. Meskipun demikian, delegasi mengakui munculnya berbagai tantangan baru, salah satunya adalah pekerja lepas (*freelance*) yang belum terakomodasi dalam jaringan pengaman sosial. Dengan populasi Korea yang menua dan permintaan layanan yang meningkat, keberlanjutan fiskal juga menjadi isu krusial. Parlemen harus memastikan sistem sosial berkelanjutan, inklusif, dan berbasis konsensus, dengan melibatkan langsung kelompok rentan demi legitimasi kebijakan.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI yang juga Anggota Komisi V DPR RI, Ibu Irine Yusiana Purba menekankan beberapa pokok pernyataan sebagai berikut;

- Menyoroti asimetri pembangunan yang disebabkan oleh globalisasi, Delegasi Indonesia menegaskan SDGs sebagai kontrak bersama untuk peningkatan martabat manusia. Agenda-agenda SDGs seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pekerjaan

layak, serta pengurangan ketimpangan harus saling menguatkan dan tidak boleh sebagai menjadi pilihan.

- Di tengah momentum bonus demografi 2030-an, Indonesia memandang perlindungan sosial adalah tugas inti negara. Sistem jaminan sosial harus inklusif, berkelanjutan secara fiskal, dan adil agar peluang demografi tidak berubah menjadi sumber ketimpangan baru.
- Parlemen harus menjadi simpul penghubung antara rakyat, kebijakan, dan anggaran. Indonesia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara belanja sosial nasional dengan komitmen SDGs, kemitraan internasional, dan kerja sama Selatan–Selatan.
- Dalam desain perlindungan sosial, Delegasi Indonesia memandang martabat manusia adalah orientasi utama. Oleh karena itu, dukungan pendapatan, akses kesehatan terjangkau, serta pengembangan keterampilan dan pekerjaan harus dirangkai sebagai strategi ketahanan jangka panjang. Di sisi lain, pendidikan harus menjadi pilar untuk memutus rantai ketimpangan antar-daerah, kelas, dan generasi.
- Untuk memastikan arah kepemimpinan parlemen yang inklusif, Delegasi Indonesia menawarkan tiga fokus. Pertama, menjamin akses layanan dasar sebagai mandat konstitusional; kedua, memastikan keadilan dan keberlanjutan fiskal melalui desain pembiayaan yang bertanggung jawab dan tepat sasaran; ketiga, melembagakan partisipasi kelompok rentan agar kebijakan dibentuk bersama mereka yang paling terdampak.

G. Sesi Keempat - *The Role of Parliament in Promoting Social Integration to Address Polarization*

Sesi ke-empat The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum di Seoul, Korea Selatan pada 12 November 2025 dimulai pada pukul 15.00 dengan topik

The Role of Parliament in Promoting Social Integration to Address Polarization.

Pada sesi ini, delegasi dari negara-negara anggota MIKTA menyampaikan pandangan dan berbagi praktek terbaik masing-masing negara dan parlemen dalam isu integrasi sosial dan polarisasi politik.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pokok-pokok pernyataan sebagai berikut:

- Delegasi Indonesia memandang polarisasi sebagai ancaman strategis bagi demokrasi dan ketahanan nasional. Berbagai permasalahan global maupun domestik membutuhkan penyelesaian bersama dan melibatkan banyak aktor. Meningkatnya polarisasi dapat berdampak kepada efektivitas multilateralisme dan kemampuan negara menanggapi krisis.
- Parlemen harus bisa memosisikan diri sebagai stabilisator sekaligus contoh

bagaimana menyelesaikan dan menghadapi. Melalui fungsi perwakilan, pembahasan, dan kompromi, parlemen dapat menurunkan suhu politik dan memulihkan kepercayaan. Gaya berdebat serta pilihan diksi para anggota parlemen akan membentuk budaya politik nasional.

- Delegasi Indonesia mengusulkan tiga pilar kepemimpinan parlemen yang inklusif untuk meredam polarisasi. Pertama, membangun kembali budaya dialog yang saling menghormati. Kedua, menjaga kepercayaan publik melalui tanggung jawab dalam retorika dan perilaku. Ketiga, membuka dialog bagi semua, secara inklusif, melalui dengar pendapat dan keterbukaan.
- Di tingkat kerja sama lintas-negara, Delegasi Indonesia memandang MIKTA memiliki posisi unik untuk memulihkan kolaborasi. Jembatan antara berbagai kawasan memungkinkan MIKTA menjaga saluran komunikasi saat fragmentasi global menguat.
- Delegasi Indonesia menegaskan bahwa negara harus memiliki komitmen untuk pada promosi dialog inklusif, penanggulangan disinformasi dan ekstremisme, serta penguatan ikatan sosial. Tujuan komitmen ini adalah memastikan integrasi sosial menjadi fondasi masa depan bersama.



Delegasi Parlemen Korea Selatan menyampaikan statemen pada sesi IV Sidang MIKTA dengan tema *The role of parliament in promoting social integration to address polarization*. Dok: 이주영/FB

Delegasi Korea memaparkan pandangannya bahwa polarisasi di tingkat domestik dan internasional yang banyak terjadi saat ini menghambat kemajuan. Delegasi menyampaikan tiga arah solusi untuk masalah ini, yaitu reformasi

sistem politik untuk mengurangi dampak sistem presidensial yang kuat, amandemen konstitusi yang sudah berusia tiga puluh delapan tahun dan disesuaikan dengan masa kini, serta penanganan ketimpangan sosial-ekonomi. Delegasi menekankan bahwa upaya tersebut harus dilakukan dengan orientasi pada kebutuhan hidup rakyat sehari-hari.

Untuk mencegah polarisasi sosial politik, Delegasi Australia menyebut pentingnya langkah edukasi publik sebagai tindakan pencegahan. Mediasi konten dan pemeriksaan fakta oleh lembaga khusus juga menjadi salah satu usulan cara mencegah polarisasi sosial politik di masyarakat. Delegasi juga menggarisbawahi bahwa isu migran dan penguatan regulasi menjadi bagian dari upaya membangun literasi kewargaan dan ruang publik yang sehat.



Delegasi Parlemen Meksiko menyampaikan statemen pada sesi IV Sidang MIKTA dengan tema *The role of parliament in promoting social integration to address polarization*. Dok: 이주영/FB

Delegasi Meksiko memulai pidatonya dengan menyampaikan, sekitar lima puluh persen warga Amerika Latin tidak percaya pada institusi demokrasi dan sebagian dari mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurut delegasi, polarisasi sering dipicu fenomena *post-truth*, sehingga pendidikan kewargaan sejak dini dan penguatan keluarga sebagai institusi pertama menjadi penting untuk menanamkan nilai hormat dan partisipasi.

Delegasi Turki menolak anggapan polarisasi bersifat *irreversible*. Parlemen memegang peran sentral membudayakan kompromi dan negosiasi. Kohesi sosial dapat dicapai melalui reformasi institusi dan regulasi, dengan membangun kembali kepercayaan berdasarkan kebenaran dan empati. Oleh karena itu dalam ranah internasional, politik harus diposisikan sebagai kerja sama untuk kesatuan, bukan pertarungan identitas.

H. Sesi Penutup

1. Pembacaan dan Adopsi Joint Statement

Pada sesi penutupan 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum, Ketua Sidang membacakan *draft* Joint Statement yang telah disetujui berdasarkan rangkaian diskusi pada seluruh sesi. Dokumen tersebut memuat komitmen bersama lima negara MIKTA dalam memperkuat multilateralisme, mendukung upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan, memastikan transisi energi yang berkeadilan di era kecerdasan artifisial, memperluas perlindungan bagi kelompok rentan, serta mempromosikan integrasi sosial dalam menghadapi polarisasi politik global.



Para Ketua Delegasi foto bersama sembari berjabat tangan tanda persetujuan untuk mengadopsi Joint Statement 11th MIKTA Speakers' Forum 2025. Dok: DPR RI

Kelima negara MIKTA kemudian menyatakan persetujuan dan secara resmi untuk mengadopsi 11th MIKTA Speakers' Forum Joint Statement. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan kolektif dalam memperkuat kontribusi parlemen MIKTA terhadap stabilitas dan tata kelola global. Adopsi tersebut juga menandai konsistensi MIKTA sebagai *platform middle-power* yang mampu menghasilkan kesepakatan substantif melalui dialog dan kemitraan setara.

2. Sambutan dari Delegasi Australia (Chair MIKTA selanjutnya)

Setelah pengesahan Joint Statement, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada perwakilan Australia sebagai tuan rumah Sidang

MIKTA berikutnya. Dalam sambutannya, Ketua Delegasi Australia menyampaikan apresiasi kepada National Assembly Korea Selatan atas penyelenggaraan forum yang inklusif dan produktif. Australia menilai bahwa rangkaian sesi tahun ini berhasil menangkap kompleksitas tantangan global dan menunjukkan kemampuan MIKTA untuk memberikan suara moderat yang konstruktif di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik.

Delegasi Australia menekankan bahwa sebagai tuan rumah berikutnya, pihaknya berkomitmen memperkuat kesinambungan agenda MIKTA, termasuk memperdalam pembahasan mengenai perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan transisi energi berkeadilan. Australia juga menyampaikan bahwa forum mendatang akan memberi perhatian khusus pada isu-isu tata kelola global, keamanan manusia, serta kolaborasi inovatif yang melibatkan parlemen, masyarakat sipil, dan komunitas epistemik. Delegasi Australia menegaskan pentingnya menjaga karakter MIKTA sebagai platform dialog yang terbuka, non-blok, dan berorientasi solusi.

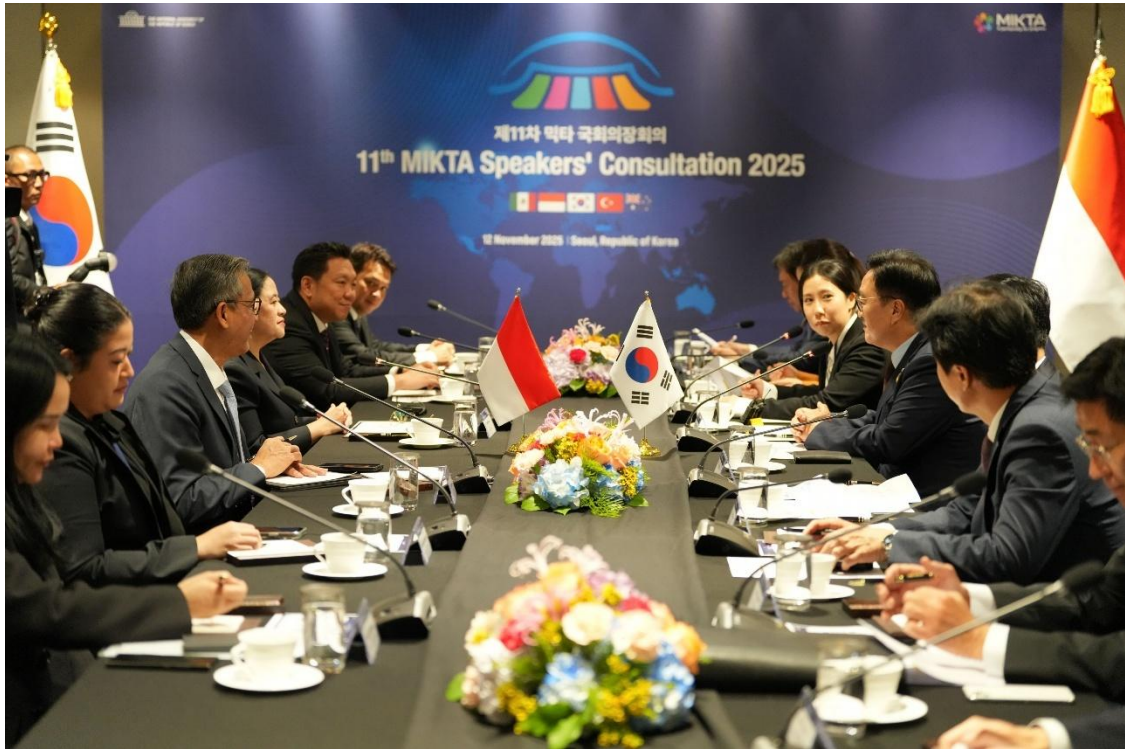
Sebagai penutup, Ketua Delegasi Parlemen Australia mengundang seluruh negara anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan tahun berikutnya. Beliau menegaskan keyakinannya bahwa MIKTA akan terus berkembang sebagai kekuatan konstruktif di panggung internasional, memperkuat solidaritas dan kepemimpinan *middle powers*, serta memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan global.



Foto bersama Delegasi sidang 11th MIKTA Speakers' Consultations Forum 2025. Dok: DPR RI

I. Pertemuan Bilateral Ketua DPR RI dengan Ketua National Assembly Korea Selatan

Di sela-sela 11th MIKTA Speakers' Consultation, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan Ketua Parlemen Republik Korea, Woo Won-Shik, melakukan pertemuan bilateral dengan pokok-pokok hasil pembahasan adalah sebagai berikut:



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memimpin pertemuan bilateral dengan Parlemen Korea Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua National Assembly Korea Selatan H.E. Woo Won-shik. Dok: DPR RI

- Kedua pihak menyepakati pentingnya kepemimpinan parlemen yang inklusif untuk menjawab krisis dan polarisasi. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua parlemen harus diarahkan pada tindak lanjut yang berorientasi hasil dan berdampak langsung bagi masyarakat di kedua negara.
- Pada hubungan antarpارlemen, kemitraan kelembagaan ditetapkan sebagai tulang punggung hubungan strategis. Peningkatan kapasitas legislasi, tata kelola, dan diplomasi parlemen akan diperluas, dengan GKSB RI–Korea sebagai poros dialog dan *focal point* kemitraan.
- Mengenai kerja sama multilateral, Delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap kandidat Republik Korea untuk Sekretaris Jenderal IPU. Pencalonan ini merupakan bentuk penguatan suara negara kekuatan menengah dan peran Global South di organisasi parlemen internasional. Delegasi Indonesia juga berharap kerja sama antara DPR RI dengan National Assembly Korea Selatan dapat bekerja sama di berbagai forum parlemen internasional untuk memperkuat sinergi dalam isu iklim, perlindungan kelompok rentan, dan penanganan konflik sosial.

- Di bidang ekonomi, Ketua DPR RI dan Ketua National Assembly Korea Selatan menyepakati optimalisasi IK-CEPA dan akselerasi investasi hijau sebagai prioritas bersama. Delegasi DPR RI mendorong agar potensi kerja sama diarahkan pada energi surya, angin, dan hidrogen, termasuk pengembangan kawasan industri rendah karbon, agar manfaat IK-CEPA semakin terasa luas.
- Selain itu, kedua delegasi sepakat untuk mendorong inisiatif-inisiatif untuk membangun ekosistem sosial-budaya, talenta, dan riset. Beberapa langkah yang akan didorong mencakup pemberian beasiswa bagi WNI untuk sekolah atau kuliah di Korea Selatan dan sebaliknya, riset kolaboratif, pertukaran dosen-mahasiswa, penguatan pusat bahasa Indonesia di Korea dan bahasa Korea di Indonesia, serta program pertukaran bahasa untuk melahirkan duta budaya muda.
- Dalam hal pemberdayaan pemuda dan pariwisata, kedua delegasi sepakat bahwa konektivitas adalah kunci. Program kepemimpinan pemuda, jejaring *start-up* lintas negara, dan peningkatan konektivitas penerbangan disampaikan oleh Delegasi Indonesia untuk mempermudah pergerakan orang, ide, dan peluang ekonomi kreatif.



Foto bersama usai pertemuan bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Korea Selatan.

Dok: DPR RI



III. HASIL PERTEMUAN

11th MIKTA Speakers' Consultation Forum yang diselenggarakan di Seoul, Republik Korea, menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang memperkuat posisi MIKTA sebagai platform *middle-power* lintas kawasan dalam menanggapi tantangan global yang semakin kompleks. Sidang ditutup dengan mengadopsi Joint Statement 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum yang ditandatangani oleh kelima Ketua Delegasi MIKTA, termasuk Ketua Delegasi Indonesia, Puan Maharani.

Dokumen bersama tersebut merefleksikan komitmen MIKTA untuk memperkuat multilateralisme, memajukan perdamaian global, serta mendorong tata kelola energi, sosial, dan politik yang lebih inklusif. Adopsi Joint Statement menegaskan konsistensi MIKTA sebagai kerja sama *middle-power* yang mampu menghasilkan keluaran substantif melalui kolaborasi setara dan pendekatan moderat.

Joint Statement 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum yang disepakati memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) **Multilateralisme dan Diplomasi Parlemen.** Para Ketua Parlemen menegaskan MIKTA sebagai platform lintas-kawasan untuk solusi konkret atas krisis global dan pencegahan serta penyelesaian konflik, di tengah menurunnya kerja sama multilateral dan meningkatnya unilateralisme. Diplomasi parlemen diposisikan untuk membangun kepercayaan dan mempercepat implementasi Agenda SDGs 2030.
- 2) **Perdamaian, Kemanusiaan dan Pencegahan Konflik.** Parlemen MIKTA akan menautkan upaya di level domestik-regional-global untuk pencegahan konflik, *peacebuilding*, dan bantuan kemanusiaan dengan memanfaatkan kapasitas serta jejaring diplomatik yang ada. Parlemen MIKTA juga mendukung langkah de-eskalasi dan dialog bagi perdamaian di Semenanjung Korea, menyampaikan sikap atas Gaza (gencatan senjata, akses bantuan, dukungan solusi dua negara) dan proses politik di Suriah.
- 3) **Aksi Iklim dan Transisi Energi yang Adil.** Parlemen negara MIKTA mempertegas komitmen untuk mempercepat aksi iklim dan menjaga keamanan, akses, dan keterjangkauan energi serta mengelola lonjakan permintaan energi akibat kemajuan teknologi. Parlemen menjanjikan kerja legislasi aktif dan model pembiayaan baru guna mengatasi dampak sosial-ekonomi transisi, mendorong transisi yang adil.
- 4) **Perlindungan Sosial dan Inklusivitas Kelompok Rentan.** Perubahan

demografis dan ketimpangan yang meningkat menuntut pengaturan kelembagaan yang lebih luwes dan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan parlemen harus demokratis merangkul beragam suara, termasuk mereka yang berada dalam situasi rentan.

- 5) **Polarisasi, Misinformasi, Disinformasi, Ekstremisme dan Populisme.** Parlemen negara MIKTA menyatakan keprihatinan serius atas dampak gabungan dari polarisasi politik dan misinformasi dan disinformasi yang merusak kohesi sosial dan dasar demokrasi. Komitmen diarahkan untuk memulihkan budaya dialog inklusif, kerja sama, dan koeksistensi damai.



IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum dengan tema "*Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future*" telah berlangsung dengan lancar dan sukses di Seoul, Republik Korea, pada 12 November 2025. Forum ini mempertemukan lima Ketua Parlemen negara MIKTA, atau perwakilannya, untuk memperkuat kontribusi *middle powers* di tengah meningkatnya tantangan global, mulai dari konflik, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga polarisasi politik.
2. Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian sidang, termasuk menyampaikan intervensi substantif dalam sesi *peacebuilding and humanitarian assistance*, serta menegaskan posisi Indonesia terkait penyelesaian damai konflik global, penghormatan terhadap hukum internasional, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
3. Dalam pembahasan Joint Statement, sejumlah prioritas yang disampaikan Delegasi Indonesia terkait penyelesaian damai, pencegahan konflik, transisi energi yang berkeadilan, serta perlindungan kelompok rentan berhasil diakomodasi secara konsensus.
4. Forum ini menghasilkan Joint Statement, yang memuat komitmen bersama untuk memperkuat diplomasi parlemen, memajukan perdamaian global, mempercepat aksi iklim dan transisi energi, mempromosikan perlindungan sosial yang adaptif, serta menghadapi tantangan polarisasi politik, misinformasi, dan disinformasi. Joint Statement tersebut menjadi pijakan strategis MIKTA dalam memperkuat peran middle-power dalam tata kelola global.
5. Sidang ini juga mencatat kontribusi penting seluruh delegasi MIKTA yang memberikan perspektif nasional mengenai *peacebuilding*, bantuan kemanusiaan, transisi energi, dan isu-isu sosial lainnya. Diskusi menghadirkan pandangan konstruktif dari Korea, Australia, Meksiko, Türkiye, dan Indonesia, yang memperkuat pemahaman kolektif dan area kolaborasi di masa mendatang.
6. Partisipasi aktif DPR RI dalam forum ini mencerminkan konsistensi Indonesia sebagai negara *middle power* yang mempromosikan solusi diplomatik, multilateralisme yang efektif, dan pembangunan yang inklusif.

Australia akan menjadi tuan rumah 12th MIKTA Speakers' Consultation Forum pada tahun 2026.

B. Rekomendasi

1. DPR RI perlu mempertahankan dan meningkatkan kehadiran aktif dalam seluruh rangkaian pertemuan MIKTA guna memastikan keberlanjutan posisi Indonesia sebagai penggerak utama kerja sama *middle-power* dalam isu perdamaian, kemanusiaan, perubahan iklim, dan tata kelola global.
2. Rapat koordinasi lintas kelembagaan antara delegasi DPR RI, Kementerian Luar Negeri RI, kementerian terkait lainnya, serta Tenaga Ahli BKSAP perlu dijadikan agenda tetap sebelum pelaksanaan MIKTA, guna memastikan penyelarasan posisi nasional dan konsistensi pesan diplomatik. Koordinasi ini penting untuk menyatukan pandangan tentang isu-isu strategis yang dibahas dalam forum.
3. Pimpinan BKSAP DPR RI agar mengusulkan penyusunan kajian tematik lintas komisi mengenai peran *middle-power* Indonesia di MIKTA, khususnya dalam isu multilateralisme, aksi iklim, dan pencegahan konflik. Kajian ini dapat melibatkan Badan Keahlian DPR (BKD) serta pakar eksternal untuk memperkuat landasan kebijakan, mendukung proses legislasi terkait transisi energi, bantuan kemanusiaan internasional, dan perlindungan sosial, serta memastikan posisi Indonesia konsisten dengan komitmen dalam Joint Statement MIKTA.



V. PENUTUP

A. Anggaran

Penyelenggaraan sidang dan partisipasi Delegasi DPR RI dalam *The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum* di Seoul, Korea Selatan pada 12 November 2025 menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.051.C.524211 dengan nominal anggaran sebesar Rp271.685.750,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

B. Keterangan dan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan dokumen lampiran sebagai berikut:

1. Undangan, *General Information. Joint Statement* dan masukan dari Kementerian Luar Negeri
2. Dokumentasi foto ([link](#))
3. Publikasi media
 - a. [Hadiri forum parlemen negara middle power, Puan bicara soal peacebuilding di Palestina dan Sudan](#)
 - b. [Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan dorong kerja sama investasi hijau dan kolaborasi budaya](#)
 - c. [11th MIKTA Speakers' Consultation Forum 2025](#)
 - d. [Dorong kerja sama hijau, perdamaian dunia dan tata kelola AI](#)

C. Ucapan Terimakasih

Delegasi DPR RI menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada National Assembly Republik Korea selaku tuan rumah *The 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum*, yang telah menunjukkan profesionalisme dan keramah tamahan sehingga seluruh rangkaian persidangan dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan sukses. Suasana kerja sama yang konstruktif dan inklusif menjadi faktor penting yang memungkinkan forum ini mencapai kesepakatan substantif bagi penguatan peran *middle-power* dalam tata kelola global.

Delegasi juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, atas dukungan substansi, fasilitasi, dan koordinasi yang diberikan dalam penyusunan materi, penajaman posisi nasional, serta pendampingan Delegasi sebelum dan selama persidangan. Dukungan lintas instansi ini memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum MIKTA berjalan selaras dengan prioritas politik luar negeri dan komitmen internasional Indonesia.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Sekretariat BKSAP DPR RI serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan teknis dan administratif, sehingga partisipasi Delegasi DPR RI dalam 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi berarti bagi penguatan diplomasi parlemen Indonesia.

D. Kata Penutup

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi dan dalam rangka ketertiban kearsipan untuk referensi bagi Delegasi DPR RI ke Sidang MIKTA Speakers' Consultation Forum berikutnya.

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas kinerja Delegasi DPR RI ke Sidang 11th MIKTA Speakers' Consultation Forum yang telah berlangsung secara pada tanggal 12 November 2025 di Seoul, Korea Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 27 November 2025
a.n. Ketua Delegasi DPR RI
Wakil Ketua BKSAP,

Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, M.Comn&MediaSt.
(A-258)



LAMPIRAN



The 11th MIKTA Speakers' Consultation

Joint Statement

Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future

Seoul, Republic of Korea

12 November 2025

1. We, the Speakers of the Parliaments of MIKTA (Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Türkiye, and Australia), gathered in Seoul, Republic of Korea, on 12 November 2025 for the 11th MIKTA Speakers' Consultation on "*Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future*" to discuss ways to strengthen multilateral cooperation and overcome global crises based on mutual understanding among nations.
2. We shared our commitment to seeking solutions to global crises, including geopolitical disputes and armed conflicts, climate change, and economic, social, and political polarization, and agreed that MIKTA, as a cross-regional platform, serves as a crucial instrument for offering concrete solutions to global challenges and peaceful approaches to the resolution and prevention of conflicts.
3. We expressed deep concern over the present circumstances in the international community where multilateral cooperation is declining and unilateralism is rising and shared the view that parliamentary diplomacy, including this Speakers' Consultation, provides a pathway to common solutions by reinforcing trust and fostering unity and cooperation among nations on the basis of international cooperation, shared solidarity, and multilateralism.
4. Furthermore, we, the Speakers of the Parliaments of MIKTA, also agreed that parliamentary diplomacy constitutes an important mechanism for sharing and reviewing the specific tasks of each parliament aimed at expediting the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals (SDGs).

5. We shared our belief that parliaments, as assemblies of the people's representatives, can help foster peace and stability, strengthen the rule of law and contribute to the resolution of global challenges on the basis of inclusive leadership through democratically incorporating diverse perspectives in parliamentary decision-making processes and institutionally embracing the voices of persons in vulnerable situations in our societies.
6. We recognized that geopolitical disputes and armed conflicts around the world are worsening humanitarian crises marked by increasing human rights violations and abuses, deepening poverty, and growing inequalities, and affirmed that MIKTA Parliaments can make significant contributions to effectively coping with such challenges by linking and simultaneously pursuing domestic, regional, and international conflict prevention, peacebuilding and humanitarian assistance, drawing upon their accumulated experience, capacity, and diplomatic networks.
7. We affirmed that achieving peace on the Korean Peninsula requires sustained efforts to ease tensions and promote exchanges and cooperation through dialogue and confidence-building, and expressed our support for the Republic of Korea's efforts in this regard. We shared the view that peace on the Korean Peninsula is closely linked to regional and global stability as well as to the strengthening of the rules-based international order, and that peace is not just the absence of conflict, but a state in which mutual trust and exchanges are institutionally supported. In this context, we agreed that, for lasting peace on the Korean Peninsula, easing tensions on the Korean Peninsula should be advanced within the framework of diplomatic solutions. Therefore, we, the Speakers of MIKTA Parliaments, resolved to continue our attention, solidarity, and cooperation to support this process through parliamentary diplomacy.
8. We welcome the 27th MIKTA Foreign Minister's Joint Communiqué on the Gaza Strip and Syria. We further welcome the current ceasefire in the Gaza Strip as an important step toward alleviating the suffering of civilians and advancing prospects for peace, security, and reconstruction. We recognize international efforts as significant for alleviating the suffering of civilians and advancing prospects for peace and security. We emphasized the urgency of ensuring humanitarian access and relief, and underscored dialogue and adherence to international humanitarian law, and inclusive political processes are essential foundations for a just and sustainable resolution. We commended the mediation efforts by Egypt, Qatar, Türkiye, and the United States to end the humanitarian catastrophe and open a window of opportunity for lasting peace. Through parliamentary diplomacy, we reaffirmed our consistent support for a two-state solution, in line with international law and relevant United Nations resolutions,

and we noted recent developments in international recognition of the State of Palestine. We, in full respect of Syria's sovereignty and territorial integrity, reaffirmed our unwavering support for the country's security and stability, pursued through a Syrian-led political process.

9. We confirmed the shared commitment of MIKTA Parliaments to accelerating climate action and acknowledged that we are facing the complex challenges of responding to the climate crisis, strengthening energy security, improving energy access and affordability, and addressing the sharp rise in energy demand driven by technological advancements. Furthermore, as enablers of inclusive initiatives to foster public discussion, MIKTA Parliaments pledged active legislative efforts and work on new financing models to address social and economic challenges arising from the energy transition process, as well as to promote a just transition.
10. We shared the understanding that macro-structural changes in our societies, such as demographic shifts and growing inequality, can affect the lives of persons in vulnerable situations more severely. For effective responses to increasing welfare demands, we recognized the need for greater flexibility and inclusivity in adequate institutional arrangement and sustainable social security systems and services.
11. We expressed serious concern that the combination of the ever more divided political polarization and the growing misinformation and disinformation has spread extremism and populism, while undermining social cohesion and threatening the foundations of democracy. Against this backdrop, MIKTA Parliaments committed to strengthening efforts to restore a culture of inclusive dialogue, cooperation and peaceful coexistence.
12. Through the outcomes of today's discussions, we reaffirmed the importance of the MIKTA Speakers' Consultation as a forum for sharing parliamentary experiences and perspectives, and expressed our hope that today's deliberations will be translated into concrete and sustained actions under inclusive parliamentary leadership to build a unified and shared future.
13. We express our sincere appreciation to the National Assembly of the Republic of Korea for its dedicated efforts in chairing and hosting the 11th MIKTA Speakers' Consultation and look forward to the 12th MIKTA Speakers' Consultation, to be held in 2026 under Australia's leadership as the next Chair, serving as a foundation for even stronger unity among MIKTA Parliaments.



EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA

ROKE – 2025 – 878

The Embassy of the Republic of Korea in Jakarta presents its compliments to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) and with reference to the Embassy's previous note No. ROKE – 2025 – 579 dated June 30, 2025, has the honor to inform the latter regarding the **MIKTA Speakers' Consultation** previously to be held on September 18, 2025 is now **rescheduled to November 12, 2025**.

The Embassy has further the honor to request the House' kind assistance to deliver the new schedule to H.E. **Dr. (H.C.) Puan Maharani**, *Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia*.

The Embassy of the Republic of Korea in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the House of Representatives of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration.

September 17, 2025

House of Representatives (DPR RI)
Republic of Indonesia
Jakarta



c.c. :

- ❖ Secretariat General of the DPR RI
- ❖ BKSAP (Committee for Inter Parliamentary Cooperation) of DPR RI
- ❖ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

General Information for
11th MIKTA Speakers' Consultation 2025
Wednesday, November 12, 2025

National Assembly of the Republic of Korea

1. Introduction

1-1 Date and venue

The National Assembly of the Republic of Korea will host the 11th MIKTA Speakers' Consultation on **Wednesday, November 12** at the Grand Walkerhill Seoul Hotel.

1-2 MIKTA Speakers' Consultation Secretariat

Please contact the MIKTA Speakers' Consultation Secretariat ("Conference Secretariat") for any inquiries regarding the conference.

Conference Secretariat :

- Tel: +82-2-6788-2769
- E-mail: ghgh87@assembly.go.kr
- Address: 409 Communication Building, National Assembly, 1 Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

2. Registration and accreditation

2-1 General

All participants should be registered in advance at the Conference Secretariat.

Participants subject for registration:

- Speakers, parliamentarians, staff (secretariat staff, security officers, and interpreter, etc), accompanying person, embassy (ambassador), press, etc.

2-2 Registration of delegation

Please fill in the enclosed registration form (Appendix I) and email us at ghgh87@assembly.go.kr by **Thursday, September 25, 2025.**

3. Conference

3-1. Draft Program

※ The Korea Standard Time is UTC/GMT + 9:00.

“Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future”(tbc)

Date	Time	Session
Nov, 12 (Wed)	09:00~10:15	Meeting with the Speaker of the National Assembly (15 minutes for each Member State delegation)
	10:20~10:30	Opening
	10:30~11:20	Sessions I -Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance
	11:30~12:20	Sessions II -The Role of Parliament in Ensuring the Just Energy Transition in the Era of AI and the Climate Crisis
	12:30~14:00	Official Luncheon
	14:00~14:50	Sessions III -The Role of Parliament in Including the Vulnerable and Reducing Inequalities
	15:00~15:50	Sessions IV -The Role of Parliament in Promoting Social Integration to Address Polarization
	15:50~16:00	Closing
	18:30	Official Dinner
Nov, 13 (Thu)		Cultural Visit (arranged upon request) *The detailed schedule of the event will be communicated in due course.

3-2. General rule

The Meeting will be composed of four sessions chaired by the Speaker of the National Assembly of the Republic of Korea. In each session, the Speaker of each MIKTA parliament will deliver an eight-minute presentation, followed by a ten-minute discussion.

Presentations will follow the MIKTA alphabetical order, starting with the host country. The country placed second in one session will be moved to the last position in the following session. The order may be adjusted in light of protocol considerations.

Session	Order
Sessions I	Republic of Korea → Türkiye → Australia → Mexico → Indonesia
Sessions II	Republic of Korea → Australia → Mexico → Indonesia → Türkiye
Sessions III	Republic of Korea → Mexico → Indonesia → Türkiye → Australia
Sessions IV	Republic of Korea → Indonesia → Türkiye → Australia → Mexico

3-3. Joint Statement

The draft joint statement of the MIKTA Speakers' Consultation will be adopted at the closing. A draft statement will be circulated by the **last week of September** at the latest by the Conference Secretariat.

3-4. Language and Interpretation

The official language of the MIKTA Speakers' Consultation is **Korean** and the working language of the meeting is **English**. Simultaneous interpretation will be provided during the conference to ensure the seamless delivery of the meeting. (Korean ↔ English, Spanish, Turkish, Indonesian)

Delegations wishing to bring a personal interpreter should inform us in advance.

For a prompt circulation of documents and accuracy of interpretation, please submit the speech of each Speaker for Sessions I and II, III, IV to the Conference Secretariat by **Friday, November 7, 2025**, at ghgh87@assembly.go.kr.

4. Other information

4-1. Hospitality

The official hotel is Grand Walkerhill Hotel. Accommodation will be provided for Speaker (Suites) and up to 6 people for 3 nights.

Expenses incurred for additional nights and service charges, such as room upgrades, minibar purchases, laundry, room service, and local or overseas calls, remain the sole responsibility of each delegate.

In accordance with the hotel's reservation policy, we would appreciate it if you could submit your registration information **no later than Thursday, September 25, 2025**.

- Hotel information

Grand Walkerhill Seoul

- Address: 177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, Seoul 04963, Republic of Korea
- Telephone: +82-2-455-5000

4-2. Transportation

Each participating country will be provided with dedicated transportation during the official program, as well as for arrivals and departures at Incheon International Airport, as outlined below:

- **Provided Transportation**

- **VIP Sedan:** 1 premium vehicle designated for the Speaker or Vice Speaker of Parliament.
- **Minibus:** 1 minibus with 14 seats for delegation members.
- **Bus:** 1 bus for larger delegations, as required.

4-3. Medical Service

Basic first aid services will be available at the hotel, including a dispensary. In case of emergency, participants will be promptly transferred to a nearby hospital. Please note that all other medical care will be at the participants' own expense, and delegates are personally responsible for any personal insurance coverage.

We kindly ask you to inform the Host Secretariat in advance of any special medical conditions or required prescriptions.

4-4. Currency

Most major credits cards, including Visa and MasterCard, are accepted at hotels, restaurants, and shopping malls in Korea.

U.S. dollars can be exchanged to Korean Won at banks or the front desk of the hotel. As U.S. dollars or traveler's checks are rarely accepted at ordinary stores, delegates are advised to exchange money into Korean Won for their convenience. An ATM is available at the official hotel.

4-5. Power

The standard voltage in Korea is AC 220V/60Hz, using two in-line holed sockets and two round-pinned plugs.

4-6. Local and Overseas Calls

For international calls to Korea, dial country code 82 and Seoul area code 2.

For international calls from Korea, press 001, 002, or 00700 prior to the country code

MIKTA Speakers’ Consultation 2025

REGISTRATION FORM (FOR SPEAKER)

HONORIFIC TITLE AND/OR SALUTATION	☐ MR. ☐ MRS. ☐ MS. ☐ DR. ☐ OTHER ()			*Image (Please attach a <u>high-resolution</u> <u>photo</u>)
FIRST NAME				
MIDDLE NAME				
LAST NAME				
COUNTRY				
GENDER	☐ MALE ☐ FEMALE			
DATE OF BIRTH	DD / MM / YYYY			
PARLIAMENT/ CHAMBER				
POLITICAL PARTY				
FUNCTION	☒ HEAD OF DELEGATION			
POSITION TITLE OF PARLIAMENT	SPEAKER			
PARLIAMENTARY COMMITTEES				
DIETARY RESTRICTION				
HOTEL RESERVATION	☒ Reservation by host (up to 6 people) ☐ Reservation by respective parliament			
FLIGHT INFORMATION	Arrival	Date & Time		
		Airport		
		Flight No.		
	Departure	Date & Time		
		Airport		
		Flight No.		

MIKTA Speakers’ Consultation 2025

REGISTRATION FORM

HONORIFIC TITLE AND/OR SALUTATION	☐ MR. ☐ MRS. ☐ MS. ☐ DR. ☐ OTHER ()		
FIRST NAME			
MIDDLE NAME			
LAST NAME			
COUNTRY			
GENDER	☐ MALE ☐ FEMALE		
DATE OF BIRTH	DD / MM/ YYYY		
PARLIAMENT/ CHAMBER			
POLITICAL PARTY			
FUNCTION	☐ HEAD OF DELEGATION ☐ MEMBER OF PARLIAMENT ☐ AMBASSADOR ☐ INTERPRETER ☐ ACCOMPANYING PERSON ☐ STAFF ☐ PRESS		
POSITION TITLE OF PARLIAMENT			
PARLIAMENTARY COMMITTEES			
HOTEL RESERVATION	☐ Reservation by host (up to 6 people) ☐ Reservation by respective parliament		
FLIGHT INFORMATION	Arrival	Date & Time	
		Airport	
		Flight No.	
	Departure	Date & Time	
		Airport	
		Flight No.	



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta Pusat 10110
E. direktorat.pelh@kemlu.go.id

T. (6221) 344 1508
F. (6221) 384 9410
W. kemlu.go.id

Jakarta, Oktober 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Bahan Masukan untuk
Pertemuan *11th MIKTA Speakers' Consultation*, Seoul, Korea Selatan, 12
November 2025

Kepada Yth:

Sekretaris Jenderal DPR RI

di

Tempat

Merujuk surat Sekretaris Jenderal DPR RI No. B/14783/KS.01.01/09/2025 dan perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahan masukan untuk pertemuan *11th MIKTA Speakers' Consultation* yang akan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 12 November 2025 (**lampiran I**). Terlampir kami sampaikan juga masukan atas *draft Joint Statement: Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future* (**lampiran II**).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kerja Sama Multilateral

Tri Tharyat

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI

Lampran I

Bahan Masukan 11th MIKTA Speakers' Consultation

Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance

Peacebuilding

1. Negara-negara yang baru keluar dari situasi konflik seringkali tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan. Menyadari tantangan ini, komunitas internasional telah mengambil langkah langkah guna menumbuhkembangkan kapasitas nasional yang diperlukan oleh negara-negara pasca konflik untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan dengan hasil yang beragam.
2. *Peacebuilding* merupakan upaya-upaya mengurangi risiko suatu negara jatuh kembali (*relapse*) ke dalam konflik melalui penguatan kapasitas nasional di bidang manajemen konflik, serta membangun dasar untuk pencapaian perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. *Peacebuilding* merupakan salah satu prioritas PBB di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional saat ini, yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas seperti *Disarmament, Demobilization and Reintegration*; pengembalian pengungsi dan *Internally Displaced Persons* (IDPs) ke daerah asal; dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum; reformasi sektor yudikatif dan keamanan; pemajuan dan perlindungan HAM; serta dukungan terhadap proses rekonsiliasi.
3. Kesuksesan upaya membangun perdamaian di negara-negara pascakonflik juga membutuhkan dukungan serta kolaborasi dengan mitra internasional. Dukungan mitra internasional juga tidak terbatas pada bantuan pendanaan, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk *capacity building* dan *peace monitoring*.
4. Dalam kerangka PBB, pemajuan agenda *peacebuilding* dilakukan di bawah *Peacebuilding Commission* (PBC). PBC sendiri merupakan *intergovernmental advisory body* PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian yang didirikan pada tahun 2005 melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/60/180 dan Resolusi DK PBB 1645 (2005).
5. *Peacebuilding Fund* (PBF) dibentuk pada akhir tahun 2005 melalui Resolusi SMU PBB A/60/180 (2005) dan Resolusi DK PBB 1645 (2005).
 - ➔ PBF merupakan komponen penting dalam memperkuat arsitektur PBB dalam mendukung upaya bina damai di negara pasca konflik.
 - ➔ PBF ditujukan sebagai upaya stabilisasi konflik, memperkuat kapasitas Pemerintah, serta institusi nasional dan lokal.
6. PBF diharapkan dapat menyalurkan bantuan pendanaan yang cepat, fleksibel dan relevan bagi inisiatif post-conflict peacebuilding.
 - ➔ Penyaluran dana PBF berfokus pada pendanaan tahap awal proses bina damai. Namun PBF juga membuka peluang pendanaan bagi negara yang tidak memiliki Multi-Partner Trust Fund untuk inisiatif bina damai.
 - ➔ Sumber dana PBF berasal dari kontribusi finansial sukarela negara anggota PBB, organisasi dan individual.
7. Hingga saat ini, PBF telah menyalurkan dana lebih dari USD 1,2 milyar ke lebih dari 60 negara dengan dukungan pendanaan dari hampir 60 negara.

8. Pembahasan isu pembangunan perdamaian di PBB juga menekankan pada peran PBB dalam mengirimkan pakar-pakar sipilnya untuk menumbuhkembangkan kapasitas nasional yang diperlukan oleh negara-negara pasca konflik untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, PBB masih memiliki kesulitan dalam mengirimkan para pakar sipilnya secara cepat ke negara-negara tersebut, terutama dalam lima aspek inti yang dibutuhkan oleh negara-negara pasca konflik, yaitu *intensive political process, basic safety and security, justice system, economic revitalization*, dan *public administration*.

Posisi Dasar Pemri

9. Peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik (*conflict resolution*), penjagaan perdamaian (*peacekeeping*), dan bina perdamaian (*peacebuilding*) merupakan salah satu agenda aksi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
10. Indonesia berkepentingan untuk terus mendorong penguatan dukungan PBB bagi pengiriman pakar-pakar sipil dari kalangan negara-negara berkembang, yang memiliki pengalaman transisi dari konflik.
 - ➔ Saat ini Pemri tengah dalam pembahasan modalitas pengiriman civilian capacity baik dalam kerangka *peacekeeping* maupun *peacebuilding*.
11. Dukungan PBB terhadap agenda bina perdamaian juga kiranya dapat merefleksikan pentingnya prinsip kepemilikan nasional dan pengembangan kepakaran sipil nasional.

Suggested Talking Point

- *Indonesia is committed to implement conflict resolution, peacekeeping and peacebuilding efforts to support the maintenance of international peace and security.*
 - ➔ *A successful peacebuilding effort will pave the way for the nation's development.*
- *Indonesia believes the importance of national ownership in the peacebuilding process and close consultation with the host government to ensure peacebuilding strategies meet the needs on the ground.*
- *Indonesia encourages the involvement of civilian experts from developing countries in peacebuilding activities.*
- *Indonesia also underscores that inclusive peace requires the participation of all segments of society, including women, youth, and local communities, whose contributions are essential to ensuring sustainable outcomes.*
- *Indonesia is of the view that the cost of inclusive peace should be seen as a long-term investment. While inclusive processes may require greater resources and time, they are indispensable to preventing relapse into conflict and to building resilient societies.*

Humanitarian Assistance

1. Seiring meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan secara global akibat konflik berkepanjangan, bencana alam, krisis iklim, dan pandemi, Indonesia turut aktif mendorong diplomasi kemanusiaan sebagai bagian dari amanat konstitusi dan komitmen terhadap tanggung jawab internasional.

2. Kontribusi Indonesia antara lain mencakup:
 - a. Pendanaan melalui *Central Emergency Response Fund* (CERF), *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA), dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC);
 - b. Pengiriman bantuan langsung ke wilayah terdampak seperti wilayah gempa Haiti dan gempa serta tsunami Jepang, bantuan teknik untuk Palestina, dan hibah serta dukungan personel dan logistik untuk mengangkut bantuan bagi Myanmar dalam kerangka ASEAN;
 - c. Kemitraan dengan organisasi internasional seperti *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) dalam peningkatan kapasitas tanggap darurat dan penanggulangan bencana serta *United Nations Office of the Recovery Coordinator* (UNORC) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat sipil melalui fasilitasi kontribusi NGO dan filantropi Indonesia seperti *Tahir Foundation* serta Baznas untuk Palestina dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) guna pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya.
3. Secara khusus, pada tahun 2024 Indonesia telah merealisasikan hibah sebesar USD 2 juta kepada UNRWA untuk mendukung program ketahanan pangan, air bersih, dan sanitasi bagi pengungsi Palestina.
 - ➔ Komitmen ini disampaikan dalam UNRWA *Pledging Conference* di New York pada 12 Juli 2024 dan direalisasikan pada 9 Desember 2024.
 - ➔ Selain hibah tersebut, Indonesia juga memberikan kontribusi tahunan sebesar USD 1,2 juta kepada UNRWA.
4. Bantuan kemanusiaan kepada Palestina juga disalurkan melalui kerja sama dengan ICRC, dengan nilai USD 500 ribu pada 2022 dan USD 2 juta pada 2024, difokuskan pada program kesehatan, air bersih, dan lingkungan. Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan dan Myanmar melalui ICRC, sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan.
5. Di samping itu, *Regional Conference on Humanitarian Assistance* (RCHA) pada 2019 dan 2021 atas inisiatif Indonesia telah menghasilkan direktori kontak dan keahlian aktor kemanusiaan Kawasan Asia Pasifik yang menjadi wadah kolaborasi lintas sektor.
6. Dalam perkembangannya saat ini, pelaksanaan bantuan kemanusiaan menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain:
 - ➔ Blokade terhadap akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik seperti Gaza dan Sudan yang menghambat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak;
 - ➔ Pemberian bantuan secara selektif kepada kelompok tertentu yang bertentangan dengan prinsip needs-based dan non-discrimination; serta
 - ➔ Penyalahgunaan atau politisasi bantuan kemanusiaan (*weaponization of humanitarian assistance*), termasuk penggunaan kelaparan sebagai alat tekanan politik atau militer, yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.
7. Dalam konteks kerja sama antarpemerintah, Indonesia kiranya dapat mendorong optimalisasi MIKTA sebagai platform untuk:
 - a. Memperkuat solidaritas dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan, mendorong penyaluran bantuan yang adil dan inklusif, serta menolak penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan politik.

- b. Mendorong penguatan kerangka regulasi nasional dan internasional terkait bantuan kemanusiaan lintas negara yang inklusif dan adaptif serta mendukung alokasi anggaran nasional yang berkelanjutan untuk kontribusi kemanusiaan global;
- c. Memperkuat mekanisme tanggap darurat bersama, termasuk dalam bentuk dukungan logistik, pertukaran informasi, dan tim respon cepat; dan d
- d. Memfasilitasi praktik baik dan peningkatan kapasitas, khususnya dalam konteks manajemen bantuan kemanusiaan di wilayah konflik, bencana, dan krisis multidimensional.

Posisi Dasar Pemri

8. Pemberian bantuan kemanusiaan harus mengikuti prinsip-prinsip *humanity, neutrality, dan impartiality*, termasuk menjunjung ketidakberpihakan terhadap kepentingan politik, ekonomi, dan militer.
9. Bantuan kemanusiaan hanya dapat dapat disalurkan dengan persetujuan negara penerima dan berdasarkan permintaan resmi negara tersebut serta penilaian kebutuhan (*needs-based assessment*) seiring penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional.
10. Indonesia mendorong peningkatan kapasitas aktor nasional dan lokal sebagai pihak pertama yang merespon situasi darurat kemanusiaan, termasuk melalui kerja sama internasional dan dialog konstruktif.
11. Indonesia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga, baik instansi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, guna memastikan respon cepat, efektif, dan terkoordinasi.

Suggested Talking Point

- *Indonesia underscores that the delivery of humanitarian assistance must strictly adhere to the principles of humanity, neutrality, and impartiality, and remain free from any political, economic, or military agenda.*
- *Indonesia stresses that humanitarian aid should be guided by needs-based assessments and provided with the consent of the affected state, in full respect of national sovereignty and territorial integrity.*
- *Indonesia continues to extend humanitarian support to those affected by conflicts and disasters...*
 ➔ *including regular assistance to Palestine through both bilateral and multilateral channels such as UNRWA and the ICRC.*
- *Indonesia calls on MIKTA to collectively advocate for respect of humanitarian principles, unhindered humanitarian access, non-selective delivery of humanitarian assistance, and the avoidance of any form of weaponization of humanitarian assistance.*

The Role of Parliament in Ensuring the Just Energy Transition in the Era of AI and the Climate Crisis

1. Kecerdasan buatan dapat memainkan peran penting dalam memajukan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
 - ➔ Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong integrasi AI ke dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta merealisasikan manfaatnya kepada masyarakat di semua negara, termasuk negara-negara *Global South*.
2. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dapat mengakselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di berbagai sektor, misalnya:
 - ➔ SDG 3 (Good Health and Well Being) melalui aplikasi AI pada teknologi medis,
 - ➔ SDG 13 (Climate Action) melalui processing data cuaca dan iklim berskala besar,
 - ➔ SDG 4 (*Quality Education*) melalui personalisasi layanan pendidikan.
3. AI merupakan satu dari lima teknologi utama yang digarisbawahi pada agenda 'Indonesia 4.0' yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, di samping *Internet of Things*, *Human-Machine Interface*, teknologi robotik dan sensor, serta 3D *printing*.
4. Pada *International Telecommunication Union Plenipotentiary Conference 2022* (ITU PP-22), Negara Anggota telah sepakati resolusi "*Applying artificial intelligence (AI) technologies for good*" yang merupakan resolusi pertama tentang AI dan TIK. Pokok-pokok resolusi yaitu:
 - a. Mendorong ITU untuk melakukan studi, berbagi informasi, dan pembangunan kapasitas;
 - b. Meminta ITU untuk mendorong ekosistem TIK untuk penyebaran teknologi AI; dan
 - c. Mencatat peluang dan tantangan AI dalam menjembatani kesenjangan digital.
5. Pada tahun 2020, atas inisiatif Sekjen PBB, telah dibentuk *High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence* yang terdiri dari pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan academia untuk memberikan rekomendasi tata kelola AI di tingkat global.
6. Terdapat peluang untuk menerapkan sistem berbasis AI di berbagai bidang parlemen. AI dapat mendukung proses administratif, legislatif, dan keterlibatan publik, serta upaya transparansi parlemen.
7. Salah satu pertanyaan penting adalah sejauh mana manusia akan mengandalkan AI untuk pengambilan keputusan. Selain itu, ada risiko kesenjangan digital yang semakin melebar antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi ini dengan mereka yang tidak memiliki akses atau aksesnya terbatas.
8. Pada *3rd UNESCO Global Forum on Ethics of Artificial Intelligence* (GFEAI) di Bangkok pada bulan Juni 2025, Delri dipimpin oleh Wamenkomdigi. Delri sampaikan posisi Pemri bahwa perkembangan tata kelola AI di tingkat global selayaknya mempertimbangkan kondisi negara-negara *Global South* khususnya negara dengan tingkat kesenjangan digital yang masih tinggi, serta mendorong inklusifitas pembahasan tata kelola AI.

Posisi Dasar Pemri

9. Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan global seperti krisis iklim dan isu-isu teknologi yang sedang berkembang seperti Kecerdasan Buatan (AI).
 - ➔ Kerja sama ini perlu mencakup fokus pada tata kelola hak asasi manusia yang memprioritaskan nilai-nilai bersama dan mendorong sistem global yang lebih representatif.

10. AI harus menjadi barang publik internasional yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, Pemerintah RI mendorong upaya-upaya untuk memastikan akses universal terhadap AI yang bersifat aman, terjamin, dan terpercaya agar lebih banyak negara dan kelompok dapat memperoleh manfaat darinya.
11. Indonesia mengakui bahwa AI merupakan teknologi strategis dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, transisi energi yang adil, dan pembangunan masa depan.
 - ➔ Saat ini, Pemerintah RI menaruh fokus pada penerapan AI untuk penggunaan praktis di berbagai sektor, dengan tujuan mencapai manfaat ekonomi yang signifikan.
12. Mengintegrasikan AI ke dalam pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di negara-negara berkembang, membutuhkan pendekatan multi-aspek untuk mengatasi tantangan-tantangan unik di negara-negara berkembang.
 - ➔ Tantangan-tantangan dimaksud mencakup pembangunan infrastruktur yang tangguh, pengembangan talenta lokal, pembinaan kerja sama internasional, dan pencapaian solusi yang bersifat etis dan lokal.
13. Terdapat risiko kesenjangan digital yang semakin lebar akibat akses yang tidak merata terhadap AI. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia mengadvokasi kolaborasi internasional dan multilateral yang menaruh fokus pada tata kelola AI, pengembangan AI yang berpusat pada manusia dan etika, serta kebijakan-kebijakan untuk mempersempit kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang.

The Role of Parliament in Including the Vulnerable and Reducing Inequalities

1. Berbagai program sosial, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pendidikan yang berkualitas merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.
 - ➔ Program sosial bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin atau rentan.
2. Pada *Creativity in Education Summit* (CES) ke-7, yang diselenggarakan di Markas Besar UNESCO Paris pada September 2025, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mentransformasi sistem pendidikan, dengan fokus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21.
 - ➔ Dalam forum tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Prancis memaparkan bagaimana Indonesia menyelaraskan kurikulumnya dengan tantangan global melalui reformasi signifikan yang menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam.
3. Pada tahun 2025, Kemenkes, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan mitra-mitra utama mengintensifkan upaya penguatan layanan kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, anak, dan remaja (RMNCAH) dengan meningkatkan perencanaan dan manajemen program kesehatan secara menyeluruh. Memastikan akses bagi seluruh perempuan, anak perempuan, dan remaja terhadap RMNCAH yang berkualitas dan layanan kesehatan lainnya sangat penting untuk mencapai cakupan kesehatan semesta dan melaksanakan Agenda Transformasi Kesehatan Indonesia.
4. Penguatan layanan kesehatan primer menjadi fokus utama RPJMN 2025–2029, termasuk melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan angka stunting, serta penurunan kematian ibu dan anak. Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) akan menjangkau seluruh kelompok usia dengan berbagai paket pemeriksaan, termasuk untuk bayi, balita, anak sekolah, dewasa, hingga ibu hamil.

5. Program sosial yang membantu masyarakat miskin atau rentan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-1: (pemberantasan segala bentuk kemiskinan ekstrem), yang dicanangkan oleh PBB untuk tahun 2030.
 - ➔ Tujuannya adalah menghapus kemiskinan dalam segala bentuk, dan memberdayakan kelompok yang rentan melalui berbagai program seperti perlindungan sosial, bantuan tunai langsung, serta akses terhadap layanan dasar dan sumber daya ekonomi.
6. Parlemen dapat mengawasi dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program sosial, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, serta bantuan hukum bagi kelompok rentan.
7. Kerja sama parlemen berperan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan yang berkualitas, baik melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun kerja sama dengan parlemen negara lain.
 - ➔ Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan best practices dalam sistem kesehatan dan pendidikan.

Posisi Dasar Pemri

8. Program sosial bertujuan untuk membantu masyarakat rentan, terutama masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, melalui berbagai inisiatif seperti subsidi tunai, dukungan layanan kesehatan, dan pelatihan kerja. Program-program ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan jaring pengaman sosial.
9. Indonesia mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui program-program sosial seperti bantuan langsung tunai dan Kredit Usaha Rakyat, di samping inisiatif-inisiatif yang menaruh fokus pada perhutanan sosial, reforma agraria, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Program-program ini, yang dirinci dalam Peta Jalan TPB Indonesia, merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
10. Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya WHO dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan berkualitas, dan menekankan perlunya negara-negara MIKTA untuk menyatukan negara-negara ekonomi maju dan berkembang guna mengatasi isu-isu global melalui transparansi, inklusivitas, dan konsensus.
11. Literasi di kalangan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas telah mencapai sekitar 96 persen, atau berpotensi lebih tinggi. Di kalangan pemuda berusia 15 hingga 24 tahun, literasi hampir universal, mendekati 100 persen. Hal ini mencerminkan kepemimpinan Pemerintah RI selama puluhan tahun, dedikasi para guru, kegigihan para pelajar, dan keterlibatan aktif masyarakat di seluruh Indonesia.
12. Indonesia menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan abad ke-21. Pemerintah RI tidak hanya menaruh fokus pada integrasi teknologi, namun juga

berkomitmen untuk mengembangkan literasi baru, seperti coding, untuk membantu generasi muda berinovasi di era digital.

Lampiran II

Preliminary draft

Deadline for revision: Oct. 9. 2025.

2025-09-26

The 11th MIKTA Speakers' Consultation

Joint Statement

Inclusive Parliamentary Leadership for a Unified and Shared Future

Seoul, Republic of Korea

12 November 2025

1. We, the Speakers of the Parliaments of MIKTA (Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Türkiye, and Australia), gathered in Seoul, Republic of Korea on 12 November 2025 for the 11th MIKTA Speakers' Consultation on "*Inclusive Parliamentary Leadership for a ~~United~~-Unified and Shared Future*," to discuss ways to restore multilateral cooperation and overcome global crises based on mutual understanding among nations.
2. We shared our commitment to seeking solutions to global crises, including geopolitical disputes and armed conflicts, climate change, and economic, social, and political polarization and agreed that MIKTA, as a cross-regional platform of middle powers, serves as a crucial instrument for offering concrete solutions to global challenges.
3. We expressed deep concern over the present circumstances in the international community where multilateral cooperation is declining and nationalism is rising and shared the view that parliamentary diplomacy, including this Speakers' Consultation, provides a pathway to common solutions by rebuilding trust among nations and fostering unity and coexistence across the Global North and South on the basis of mutual understanding.
4. Furthermore, we, the Speakers of the Parliaments of MIKTA, also agreed that parliamentary diplomacy constitutes an important mechanism for sharing and reviewing the specific tasks of each parliament aimed at expediting the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).
5. We shared our belief that parliaments, as assemblies of the people's representatives, can mitigate domestic and international conflicts and contribute to the resolution of global challenges on the basis of inclusive leadership through democratically incorporating diverse perspectives in parliamentary decision-making processes and institutionally embracing the voices of vulnerable groups in our societies.
6. We recognized that geopolitical disputes and armed conflicts around the world are worsening humanitarian crises such as human rights violations, poverty, and inequality, and affirmed that MIKTA Parliaments can make significant contributions to effectively coping with such challenges by linking and simultaneously pursuing peacebuilding and humanitarian assistance, drawing upon their accumulated experience and diplomatic networks.
7. In this regard, we affirmed that achieving peace on the Korean Peninsula requires sustained efforts to ease tensions through dialogue and confidence-building, and to promote exchanges and cooperation. In addition, we, the Speakers of MIKTA Parliaments, resolved to continue our

attention and cooperation to underpin this process through parliamentary diplomatic support and solidarity.

8. We confirmed the shared commitment of MIKTA Parliaments to swift climate action, and recognized that we are facing the complex challenges of responding to the climate crisis and addressing the sharp rise in energy demand driven by AI advancement. Furthermore, as enablers of inclusive initiatives to foster public discussion, MIKTA Parliaments pledged active legislative efforts to address social and economic challenges arising from the energy transition process, including unemployment, local economic slowdowns, and energy poverty among vulnerable groups, as well as to promote a just transition.
9. We shared the understanding that macro-structural changes in our societies such as low birth rates, aging populations, and growing inequality can affect the lives of vulnerable groups more severely than anyone else. For effective responses to increasing welfare demands, we recognized the need for greater flexibility and inclusivity in social security systems, and an institutional foundation that ensures more efficient and equitable funding.
10. We expressed serious concern that the combination of hostile party politics, which define opponents as enemies, and fake news generated by a distorted media ecosystem, has spread extremism and populism, while undermining social cohesion and threatening the foundations of democracy. Against this backdrop, MIKTA Parliaments committed to strengthening efforts to restore a culture of inclusive dialogue, cooperative governance, and a politics guided by compromise and coexistence ~~among political parties..~~
11. Through the outcomes of today's discussions, we reaffirmed the importance of the MIKTA Speakers' Consultation as a forum for sharing parliamentary experiences and perspectives, and express our hope that today's deliberations will be translated into concrete and sustained actions under inclusive parliamentary leadership to build a unified and shared future.
12. We express our sincere appreciation to the National Assembly of the Republic of Korea for its dedicated efforts in chairing and hosting the 11th MIKTA Speakers' Consultation and look forward to the 12th MIKTA Speakers' Consultation, to be held in 2026 under Australia's leadership as the next Chair, serving as a foundation for even stronger unity among MIKTA Parliaments.



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id